

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah dilakukan oleh penelitian lain di beberapa daerah dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi

Tabel 1 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Lestari,B Anggun Hilendri (2018) Akuntabilitas koperasi melalui laporan keuangan	Akuntabilitas melalui laporan keuangan	Akuntabilitas KSP karya mandiri selong melalui penyusunan laporan keuangan belum optimal optimal yang ditunjukkan dengan penyusunan laporan keuangan hanya berisi laporan per bulan brisi laporan pinjaman atau piutang dan setoran nasabah koperasi	Perbedaan : terletak pada objek dan subjek penelitian yaitu pada Koperasi Guna Jaya Jombang, sedangkan penelitian pada Ksp Karya Mnadiri Selong Persamaan : terletak pada fokus penelitian Akuntabilitas
2.	Masrunik, endah. Andayani, puji (2017) Analisis SistemAkuntan si Kredit	Sistem akuntansi yang diterapkan dalam pemberian kredit pada Koperasi Tunas Arta Makmur	Sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Tunas Arta masih sangat sederhana. Dilihat dari prosedur yang digunakan, terlihat tiga fungsi yang terkait dengan sistem pemberian kredit yaitu, fungsi kasir, fungsi marketing dan fungsi akuntansi. Dimana fungsi marketing merangkap tugas kerja	Perbedaan : terletak pada objek dan subjek penelitian yaitu pada Koperasi Guna Jaya Jombang, sedangkan penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam Arta Makmur Blitar) Persamaan : terletak pada focus penelitian tentang pemberian kredit

			selain mencari nasabah juga melaksanakan tugas kerja sebagai surveyor. Analisi dan survey dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal.	
3.	Lestari, ade lita (2018) analisis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) dalam penyajian laporan keuangan pada koperasi pegawai republik indonesia (kpri) keluarga kabupaten batu bara	mengetahui dan menganalisis Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Keluarga Kabupaten Batu Bara dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Keluarga Kabupaten Batu Bara	Laporan keuangan yang disusun KPRI Keluarga Kabupaten Batu Bara terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, dan KPRI Keluarga Kabupaten Batu Bara belum melakukan penerapan SAK ETAP secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan karena tidak menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan dan penyusunan Laporan Arus Kas tidak diklasifikasikan menurut aktifitasnya yang berdasarkan SAK ETAP	Perbedaan : terletak pada objek dan subjek penelitian yaitu pada Koperasi Guna Jaya Jombang, sedangkan penelitian pada KPRI Keluarga Kabupaten Batu Bara belum Persamaan : terletak pada pembahasan tentang laporan keuangan
4.	Nurdamasih, kadek. Atmadja, Anantawikrama tungga. Julianto, I putu (2019) transparansi dan akuntabilitas pengelolaan	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit mutranin	Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit mutranin di Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pakraman Bila Bajang sudah dilakukan dengan baik. Hal ini	Perbedaan : terletak pada objek dan subjek penelitian yaitu pada Koperasi Guna Jaya Jombang, sedangkan penelitian pada Mutranin di Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pakraman Bila Bajang

	keuangan sistem pemberian kredit mutranin pada dadia tangkas kori agung desa pakraman bila bajang, kecamatan kubutambahan		dapat dilihat dari adanya keterbukaan informasi kepada seluruh krama dadia terkait posisi keuangan dadia setiap bulan, diikutsertakannya seluruh krama dadia dalam rapat-rapat penting, serta adanya laporan pertanggungjawaban setiap sangkepan. Dalam proses pertanggungjawabannya , Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pakraman Bila Bajang telah menerapkan akuntabilitas vertikal serta telah memenuhi akuntabilitas proses dan akuntabilitas program	Persamaan : terletak pada focus penelitian tentang akuntabilitas
5.	Puji Winarko Sigit, puspiterna (2020) Analisis Akuntabilitas penyelnggarakan organiasai dan manajemen serta keuangan sakti	Akuntabilitas	Pada kinerja akuntabilitas penyelenggaraan organisasi dan manajemen yang terdiri dari delapan indikator, enam diantaranya masuk ke dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan indikator kinerja pertumbuhan dan peningkatan anggota masuk dalam kategori Cukup. Dan indikator kinerja partisipasi anggota sebagai pengguna jasa masuk ke dalam kategori Kurang. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas penyelenggaraan organisasi dan	Perbedaan : terletak pada objek dan subjek penelitian yaitu pada Koperasi Guna Jaya Jombang, sedangkan penelitian pada KSP Sakti Kota Kediri periode 2018 Persamaan : terletak pada focus penelitian tentang akuntabilitas

			<p>manajemen</p> <p>pada KSP Sakti pada umumnya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi partisipasi anggota</p> <p>koperasi sebagai pengguna jasa masih rendah.</p>	
6.	<p>Kholmi, M (2016)</p> <p>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana DESA: Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang</p>	<p>Akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>	<p>Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa akan digunakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi pembangunan fisik dan pemberdayaan sebesar 70 % dan 30 % biaya operasional pemerintah desa. Biaya untuk pemberdayaan masyarakat meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, yaitu pembuatan drainase, mengembangkan BUMDes. Rencana dana program ADD tahun 2015 untuk pemberdayaan masyarakat melalui usaha desa dengan beli mesin potong padi dan ingin mengembangkan lumbung desa dengan pengambilan padi dari masyarakat seperti yang pernah dilakukan pada era orde baru. Sedangkan ungkapan Staf Pemerintahan Desa</p>	<p>Perbedaan : terletak pada objek dan subjek penelitian yaitu pada Koperasi Guna Jaya Jombang, sedangkan penelitian pada Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang</p> <p>Persamaan : terletak pada focus penelitian tentang akuntabilitas</p>
7.	<p>Akbar, rusdi (2016)</p>	<p>Praktik akuntabilitas dan pengukuran</p>	<p>Salah satu temuan penting dalam studi tentang praktik</p>	<p>Perbedaan : terletak pada objek dan subjek penelitian yaitu pada</p>

	Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah	kinerja institusi pemerintah daerah di Indonesia	akuntabilitas di pemerintah daerah adalah bahwa dari ketiga faktor penentu yang diteliti, hanya kapasitas organisasi yang secara statistik berpengaruh sangat signifikan sementara tekanan eksternal dan komitmen manajemen tidak berpengaruh signifikan. Jika temuan menjadi dasar pengambilan kebijakan, maka jelas sekali bahwa peningkatan kapasitas organisasi yang dalam studi ini dirinci ke dalam empat hal, yaitu: (1) sistem informasi manajemen, (2) anggaran kinerja, (3) kemampuan pegawai, dan (4) surplus anggaran menjadi sangat penting dan harus diberikan porsi yang cukup besar guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah.	Koperasi Guna Jaya Jombang, sedangkan penelitian pada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia Persamaan : terletak pada focus penelitian tentang akuntabilitas
8.	Sari, D. I. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)(Studi Kasus Pada Satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara) (Doctora	Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada salah satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara	Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara Pengelolaan anggaran dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara belum maksimal dalam menerapkan akuntabilitas dalam hal perencanaan dana BOS dan pelaksanaan dana BOS namun, dalam hal penggunaan dana BOS	Perbedaan : terletak pada objek dan subjek penelitian yaitu pada Koperasi Guna Jaya Jombang, sedangkan penelitian pada Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara) Persamaan : terletak pada focus penelitian tentang akuntabilitas

	I dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).		dan pelaporan dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara telah menerapkan prinsip akuntabilitas	
9.	Purnomo, B., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i>	akuntabilitas, transparansi dan pengawasan mempengaruhi kinerja anggaran berkonsep <i>Value for money</i>	Penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pegawai pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung secara menyeluruh dikatakan sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan fakta yang menyatakan bahwa Kota Bandung adalah satu-satunya kota di Jawa Barat yang mendapatkan predikat A dalam laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB. Walaupun begitu, ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan lagi yaitu salah satunya pada indikator pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal, khususnya pada pernyataan tentang keterlibatan masyarakat dalam tahapan pengelolaan anggaran. Pemerintah sudah seharusnya melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan anggaran ini, agar apa yang menjadi program pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.	Perbedaan : terletak pada objek dan subjek penelitian yaitu pada Koperasi Guna Jaya Jombang, sedangkan penelitian pada Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung Persamaan : terletak pada focus penelitian tentang akuntabilitas

10.	Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015	Menggambarkan dan menganalisa tentang efektivitas Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 – 2015	Dalam pembahasan penulis dapat menjelaskan beberapa hal dari hasil analisis taitu ada beberapa faktor yang mepengaruhi efektivitas PBRT yaitu, (1) Peranan Pendamping yang kurang sehingga menyebabkan terjadinya stagnan dalam implementasi Program (2) Partisipasi masyarakat yang menjadi harapan keberlangsungan PBRT masih membutuhkan perhatian karena ketidak fahaman terhadap kebijakan, (3) Keterbatasan Sumber Daya seperti Sumber Daya Manusia, (4) Stuktur Organisasi yang kurang memadai, (5) Komitmen yang rendah dari pelaksana yaitu dari Inovasi	Perbedaan : terletak pada objek dan subjek penelitian yaitu pada Koperasi Guna Jaya Jombang, sedangkan penelitian pada Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung Persamaan : terletak pada focus penelitian tentang efektivitas
-----	--	--	---	---

Sumber : Berbagai Literatur Penelitian

Sumber : Berbagai literature penelitian

Berdasarkan review penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dan juga membahas tentang akuntabilitas. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah terdapat pada objek dan waktu penelitian terdahulu.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti ini lebih memilih menggunakan penelitian Lestari, B Anggun Hilendri (2018) Akuntabilitas

koperasi melalui laporan keuangan. Menggunakan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data menggunakan wawancara observasi, dan dokumentasi. Berikut perbedaannya yaitu :

1. Lokasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Guna Jaya Jombang
2. Untuk penelitian saat ini menggunakan wawancara dan dokumentasi serta observasi.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Konsep *Agency Theory* menyangkut prinsipal dan agen yang terjalin dalam suatu hubungan atau kontrak, dimana prinsipal memanfaatkan agen untuk menjalankan kepentingannya, sedangkan agent adalah pelaksana kepentingan pihak bersangkutan (Scott, 2015).

Menurut Supriyono (2018:63), menyangkut hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini berpusat pada prinsip menggunakan jasa agen sebagai pembuat keputusan yang yang menguntungkan bagi prinsipal terutama dari segi laba perusahaan secara optimal.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teori keagenan (*agency theory*) yaitu kontrak yang timbul antara prinsipal dan agen yang didasari kepentingan organisasi bisnis dalam mencapai tujuan. Dalam kegiatan bisnis kontrak diperlukan sebagai bentuk perjanjian secara resmi untuk mendelegasikan wewenang sekaligus penyelarasan atasan ke bawahan

terkait kepentingan yang akan dicapai supaya tidak menimbulkan konflik kedepannya.

2.2.2 Koperasi

Menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, telah disebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, Koperasi adalah Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan gerakan ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf kehidupan anggotanya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.

Menurut Fay (1980) Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Menurut G Mladenata. Koperasi adalah terdiri atas produsen-produsen kecil yang tergabung seeara sukarela untuk meneapai tujuan bersama dengan saling tukar jasa seeara kolektif dan menanggung resiko

bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota

a. Tujuan koperasi

1. Untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya.
2. Untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi.
3. Membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
4. Koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional
5. Tidak hanya untuk anggota, koperasi juga memiliki peran penting bagi para konsumen atau pelanggannya

b. Prinsip Koperasi

Prinsip dasar koperasi telah tereantum dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-undang No. 12 Tahun 1967.

Koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak. Prinsip dasar koperasi adalah

1. Landasan Idiil Pancasila yaitu Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-

landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila.

2. Landasan Struktural UUD 1945 yaitu Undang-undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi pada kedudukan sebagai Soko Guru perekonomian nasional.
3. Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945 yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1 : “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas sebagai kekeluargaan.” Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan sesuai dengan itu adalah. UU Koperasi No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

c. Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi di Indonesia dapat dibedakan menurut hal, yaitu kegiatan koperasi menurut fungsinya, berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, menurut status keanggotaannya dan koperasi berdasarkan jenis usahanya.

1. Kegiatan Koperasi menurut Fungsinya.

Jenis Koperasi menurut fungsinya bisa dikelompokkan menjadi :

- a. Koperasi penjualan/pemasaran merupakan koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota

berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

- b. Koperasi produksi merupakan suatu koperasi yang dapat menghasilkan jasa dan barang, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di situ anggota memiliki peran sebagai pemilik serta pekerja koperasi.
- c. Koperasi jasa merupakan koperasi yang mengadakan atau menyelenggarakan suatu pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Contohnya: simpan pinjam, angkutan, asuransi, dll. Di situ anggota memiliki peran sebagai pemilik serta pengguna layanan jasa koperasi.

2. Koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah.

a. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang jumlah anggotanya minimal sebanyak 20 orang perseorangan yang didirikan oleh orang seorang. (Yudhi, 2016)

b. Koperasi Sekunder

Koperasi yang terdiri dari penggabungan badan koperasi dan mempunyai kecakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder bisa dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Koperasi Pusat : Merupakan koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.
 - 2) Gabungan Koperasi : Merupakan koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.
 - 3) **Induk Koperasi** : Merupakan koperasi yang minimum anggotanya ialah 3 gabungan koperasi.
3. Koperasi menurut status Keanggotaannya.
- a. Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan suatu koperasi yang beranggotakan para produsen jasa/barang yang memiliki rumah tangga usaha.
 - b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen merupakan koperasi suatu koperasi yang beranggotakan para konsumen akhir atau pemakai jasa/barang yang ditawarkan para pemasok di pasar. Kedudukan suatu anggota dalam koperasi bisa berada dalam salah satu status atau pun bisa keduanya. Dengan demikian pengelompokan koperasi menurut status anggotanya memiliki keterkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.
4. Koperasi berdasarkan jenis usahanya.

Jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya dapat dikelompokkan menjadi:

a. Koperasi simpan pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani pinjaman. Apabila anggota menabung (menyimpan) maka akan mendapatkan imbalan jasa bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

b. Koperasi Serba Usaha (KSU)

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota/ masyarakat, unit produksi.

c. Koperasi pegawai negeri.

Koperasi pegawai negeri merupakan koperasi yang beranggotakan pegawai negeri.

2.2.3 Koperasi Simpan Pinjam

1. Pengertian koperasi simpan pinjam

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Menurut Rudianto koperasi simpan pinjam adalah sebuah unit usaha yang bergerak

dalam pengumpulan dana anggota, yang bertujuan untuk dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan modal usaha.

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Menurut Pendapat Ninik Widiyanti & Sunindhia Kedua pakar koperasi diatas mengemukakan bahwa koperasi simpan pinjam yaitu suatu usaha yang bergerak dalam bidang pengumpulan modal dengan cara tabungan dan pinjaman dari anggotanya.

Tujuan pengumpulan dana tersebut yaitu untuk memudahkan para anggotanya agar mendapatkan modal usaha yang produktif dan menambah kesejahteraan Berdasarkan Peraturan Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 pasal 2 pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilaian, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya

2. Peran Koperasi Simpan Pinjam

Sesuai dengan prinsip dan tujuan didirikannya sebuah Koperasi Simpan Pinjam, maka ada beberapa peran dari Koperasi Simpan Pinjam yang sangat penting untuk para anggotanya, seperti :

1. Memberikan kesejateraan untuk anggotanya dengan adanya penyaluran dana kredit
2. Memberikan bunga yang ringan untuk menghindari lintah darat
3. Membagikan SHU yang akan digunakan sebagai dana segar bagi anggota yang aktif
4. Mengelola dana simpanan dan tabungan sebagai bentuk investasi para anggotanya

2.2.4 Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris *accountability* yang memiliki makna pertanggungjawaban atau dengan kata lain memiliki arti suatu keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau suatu keadaan yang diminta pertanggungjawaban dari segala lapisan komponen penggerak jalannya semua kegiatan perusahaan, yang sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing

Menurut Sony dkk., akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang memiliki makna bahwasannya proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-

benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Menurut Nanang Fattah bahwa akuntabilitas ialah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya

Mardiasmo menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

Menurut Halim akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga atas segala tindakannya yang ditujukan kepada yang memberi wewenang

Ada tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya transparansi para penyelenggara Koperasi dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola Koperasi
2. Adanya standar kerja, disetiap bagiannya yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya;

3. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas Koperasi adalah pertanggungjawaban terhadap pemasukan, pengeluaran dan penggunaan keuangan koperasi kepada pemilik , masyarakat dan pemerintah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan

2. Tujuan Akuntabilitas

Menurut Herbert, Killough dan strets dalam Waluyomanajemen organisasi harus “accountable” untuk:

- a. Menentukan tujuan yang tepat
- b. Mengembangkan standar ysng diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan
- c. Secara aktif mempromosihkan penerapan pemakaian standar
- d. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisiensi

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap koperasi . Pengelolaan manajemen koperasi yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh koperasi

Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja koperasi dan kepuasan publik terhadap pelayanan kredit yang diselenggarakan koperasi, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan koperasi dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan koperasikepada publik. Dari adanya tujuan akuntabilitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntabilitas adalah menciptakan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan.

3. Asas – asas akuntabilitas

Sedarmayati, (2008) mengatahkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas – asas sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan seluruh staf koperasi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- b. Beberapa system yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan pertauran perundangan – undangan yang berlaku
- c. Menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh

- e. Jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen koperasi

4. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas

Untuk mengukur berhasil atau tidaknya akuntabilitas dalam manajemen koperasi, dapat dilihat pada beberapa hal, sebagaimana dinyatakan oleh Slamet beberapa indikator keberhasilan akuntabilitas adalah:

- a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan public terhadap koperasi
- b. Tumbuhnya kesadaran public tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan system kredit dikoperasi

5. Manfaat Akuntabilitas

Upaya perwujudan system akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk :

- a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- b. Mendorong terciptanya. Akuntabilitas resvonnives organisasi
- c. Mendorong partisipasi masyarakat
- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisiensi, efektif, ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

2.2.4 Efektivitas

Efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuandengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk

mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal. Menurut Campbell J.P. (1970), Pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah: Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output, Pencapaian tujuan menyeluruh.. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan program yang akan diteliti, yaitu peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut.

Aspek Efektivitas :

1. Keberhasilan program dan sasaran
2. Kepuasan terhadap program
3. Tingkat input dan output
4. Penapaian tujuan menyeluruh

2.2.5 Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Undang – undang Perbankan No 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Unsur – unsur kredit

Adapun unsur – unsur didalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, Edisi Revisi 2014: 86)

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar – benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa mendatang

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yangtelah disepakati

d. Resiko

Dengan adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga

4. Fungsi Kredit

Pemberian adalah suatu fasilitas kredit yang mempunyai fungsi tertentu , Adapun fungsi utama dalam pemberian suatu kredit sebagai kredit : (Kasmir, 2018:89)

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang , maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barangmaupun jasa untuk penerima kredit

b. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberihkan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat , kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara

c. Untuk Meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha apalagi bagi nasabah yang dari awal modalnya pas pasan

5. Jenis Kredit

Secara umum jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain : (Kasmir, Edisi Revisi 2014:90)

a. Dilihat dari tujuan penggunaah

1. Kredit Investasi

Kredit Investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru ataupun pabrik baru

2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja biasanya dapat digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam segi operasional

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif biasanya diberikan secara pribadi, kredit ini biasanya digunakan untuk membeli rumah ataupun merenovasi rumah ataupun untuk membeli mobil dan sebagainya

2. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatkan usaha atau produksi ataupun investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kredit ini biasanya dipakai untuk membangun sebuah pabrik untuk menghasilkan barang

3. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini biasanya diberikan kepada supleyer ataupun agen agen perdagangan yang akan membeli dalam jumlah yang besar

c. Dilihat dari jangka waktu

1. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja dan sebagainya

2. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi

3. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit panjang waktu pengembalianya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya dipakai untuk kredit perumahan

6. **Pemberian Kredit**

Berdasarkan penjelasan Pasal Undang - undang Nomer 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa dalam pemberian kredit harus memenuhi dasar pokok – pokok ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) , antara lain :

1. Persyaratan dan tata cara pemberian kredit berdasarkan prinsip kehatiian dan kepercayaan, termasuk didalamnya persyaratan Koperasi penerima .
2. Jangka waktu, tingkat suku bunga atau nisbah bagi hasil dan biaya lainnya
3. Jenis agunan berupa surat berharga dan tagihan yang mempunyai peringkat tinggi
4. Tata cara pengikatan agunan

7. **Pengertian Analisis Kredit**

Analisis kredit adalah semacam kelayakan atau perusahaan pemohon kredit, Penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian dan analisa terhadap kelengkapan, dan kelayakan berkas atau data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak

8. **Tujuan Analisa Kredit**

Tujuan utama analisa kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank , baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya , sesuai kesepakatan yang berlaku

9. **Prosedur Dalam Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukun, sebagai berikut : (Kasmir, Edisi Revisi 2014:100)

1. **Pengajuan berkas – berkas**

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas – berkas lainnya yang dibutuhkan. Penganjuan proposal kredit hendaknya yang berisi, antara lain :

- a. Latar belakang perusahaan Seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya ,perkembangan perusahaan. 28
- b. Maksud dan tujuan Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada yang pemohonnya.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas – berkas yang telah dipersyaratkan seperti :
 - 1) Akte notaris. Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau Yayasan.

- 2) TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemen perindustrian dan perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.
- 3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia (BI) adalah NPWP-nya.
- 4) Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir
- 5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
- 6) FotoCopy sertifikat jaminan.

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

- a. Current ratio
- b. Acid test ratio
- c. Inventory turn over
- d. Sales to receivable ratio
- e. Profit margin ratio
- f. Return on net worth
- g. Working capital

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak

perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan pihak bank inginkan, wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah sebenarnya.

4. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan , kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan. Catata yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kecocokkan dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Jangka waktu kredit.
- c. Biaya – biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan akad kredit

Merupakan kegiatan lanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan :

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung
- b. Atau dengan melalui notaris

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu :

- a. Sekaligus
- b. Secar bertahap

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat diuraikan bahwa koperasi jaya melakukan penyaluran dan penarikan kredit jika sesuai dengan prosedur yang ada maka akan meminimalisir terjadinya kredit macet sehingga terjadinya efektifas kredit dan Akuntabilitas kredit dapat dijalankan

